

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan tahunan mengkomunikasikan informasi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan *stakeholders*. Laporan tersebut juga merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bagi para manajer dalam organisasi. Menurut Juniarti dan Andriyani (2009), informasi yang diungkap dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan dalam pengungkapan wajib (*mandatory disclosures*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosures*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi (di luar) dari yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan. Pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi faktor biaya dan manfaat.

Kondisi lingkungan ekonomi yang berubah-ubah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dunia usaha. Perusahaan dihadapkan pada kondisi untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaannya, sehingga dapat membantu pengambil keputusan dalam mengantisipasi kondisi yang semakin

berubah. Dalam bisnis yang semakin kompetitif, informasi yang terdapat dalam laporan tahunan sangat penting dalam mengefisiensikan pengalokasian dana investasi untuk pemakaian yang paling produktif. Laporan tahunan hendaknya disajikan apa adanya, tidak dibuat-buat, jujur, netral, dan objektif. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan ada dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Menurut keputusan ketua BAPEPAM Kep-134/BL/2006, perusahaan harus membuat laporan tahunan. Pengungkapan informasi perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang wajib diberitahukan suatu perusahaan yang diatur dalam ketentuan BAPEPAM Kep-40/BL/2007 tentang pengungkapan informasi dalam laporan tahunan. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi di luar pengungkapan wajib yang diberikan perusahaan secara sukarela oleh perusahaan kepada para pemakai laporan. Menurut FASB(1984), pengungkapan sukarela memberikan informasi tentang berbagai strategi dan elemen kritis yang memiliki arti penting untuk operasi perusahaan di masa mendatang. Pengungkapan sukarela perusahaan, merupakan pilihan bebas pada manajer untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan tahunan. Memahami mengapa perusahaan mengungkapkan informasi secara sukarela berguna untuk kedua penyusun dan pengguna informasi akuntansi, serta pembuat kebijakan akuntansi (Buzby, 1975; Meek, Roberts dan Gray, 1995).

Pada tahun 1997, krisis Asia melanda Indonesia dan menyebabkan sejumlah besar kegagalan bisnis. Hal tersebut disebabkan karena kegagalan penerapan *corporate governance*. Contohnya seperti standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, sistem regulasi yang kurang mendukung, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan direksi yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. *Corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis. Dalam era keterbukaan sekarang, maka tuntutan untuk mengelola suatu entitas dengan akuntabilitas dan transparan tidak dapat dihindarkan. Salah satu bentuk transparansi yang lebih luas kepada publik adalah dengan menerapkan *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan, dan mengurangi asimetri informasi antara pihak eksekutif dan para *stakeholder* perusahaan.

Secara teoritis, penerapan *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan penerapan *corporate governance* dapat mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para investor. Meningkatnya tingkat kepercayaan tersebut disebabkan karena penerapan *corporate*

governance dianggap mampu memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar (Tjager, Alijoyo, Djemat, dan Soembodo, 2003). Bila didalami lebih lanjut, sebenarnya ada hubungan antara pengungkapan dengan *corporate governance*, Jensen dan Meckling (1976) menyatakan teori agensi positif menyediakan suatu rerangka yang menghubungkan perilaku pengungkapan dengan *corporate governance*. Berbagai atribut *corporate governance* berguna untuk mengendalikan permasalahan agensi dengan memastikan bahwa para manajer telah bertindak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham.

Dalam pelaksanaan mekanisme *corporate governance* terdapat kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Menurut Faizal (2004), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan, dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin tinggi kepemilikan

institusional, maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2005). Menurut Shleifer dan Vishny (dalam Haruman, 2008), jumlah pemegang saham yang besar (*large shareholders*) mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti kepemilikan oleh institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara lebih efektif dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tingginya kepemilikan oleh institusional akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, pemilik institusional akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan miliknya. Dalam rangka pelaksanaan mekanisme *corporate governance* Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit. Coller dan Gregory (dalam Sembiring, 2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja manajer secara efektif. Oleh karena itu, pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen juga akan semakin besar. Dengan melihat hubungan kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen dengan

kualitas laporan keuangan, maka mengindikasikan adanya pengaruh terhadap keluasan pengungkapan sukarela. Selain kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen dalam *corporate governance* ditentukan oleh kualitas auditor. Dengan adanya kualitas auditor yang baik memungkinkan *corporate governance* yang lebih baik pula. Dalam mengidentifikasi kualitas auditor dapat dilihat dari ukuran akuntan publik sebagai proksi.

Dalam sebuah usaha pasti terdapat berbagai macam kondisi. Kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba tergantung dari kondisi pasar. Kondisi pasar yang kurang menguntungkan menyebabkan kerugian untuk perusahaan. Kerugian yang disebabkan pasar yang tidak menguntungkan mengakibatkan kesulitan keuangan pada perusahaan. Kesulitan keuangan berdampak pada keputusan investasi dan pemberian kredit. Kesulitan keuangan membuat para manajer berinisiatif untuk melakukan strategi untuk menarik para investor dan kreditor. Salah satu strategi manajer dengan cara melakukan pengungkapan yang melebihi dari pengungkapan yang diwajibkan. Hal ini bertujuan meningkatkan kepercayaan pihak investor dan kreditor. Beberapa peneliti mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan luas pengungkapan sukarela. Chen, De Fond, dan Park (2002) menemukan bahwa kemungkinan besar perusahaan menghadapi kondisi ketidakpastian menerima pendapatan di masa depan akan melaporkan *balanced sheet disclosure*. Penelitian tersebut diperkuat

dengan penelitian Holder-Webb dan Marie (2002) yang menemukan bahwa para manajer perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung meningkatkan kualitas pengungkapan. Sama halnya dengan penelitian Webb dan Cohen (2007) juga beragumen bahwa rata-rata manajer perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih meningkatkan kualitas pengungkapannya. Hasil penelitian Holder-Webb dan Marie (2002) dibantah oleh Nasir dan Abdullah (2004). Nasir dan Abdullah (2004) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih sedikit mengungkapkan informasinya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Dari perbedaan pendapat temuan tersebut maka peneliti tertarik untuk melihat pengaruh kondisi keuangan terhadap pengungkapan sukarela. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kondisi keuangan terhadap luas pengungkapan sukarela.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

- 1.a. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela?
- b. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela?
- c. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela?

2. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. a. Untuk menguji pengaruh kepemilikan instutional terhadap luas pengungkapan sukarela.
- b. Untuk menguji pengaruh proporsi dewan komisaris indpenden perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela.
- c. Untuk menguji pengaruh kualitas auditor terhadap luas pengungkapan sukarela.
2. Untuk menguji pengaruh kondisi keuangan terhadap luas pengungkapan sukarela.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah literatur atau referensi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya serta dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan di bidang pengungkapan laporan tahunan perusahaan serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya tentang karakteristik perusahaan dan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Serta mampu memberikan manfaat untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan di Indonesia serta lebih menambah wawasan dalam mengaplikasikan konsep pengungkapan bagi perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang akan membahas dua hal, yaitu latar belakang masalah mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kondisi keuangan terhadap luas pengungkapan sukarela yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar baik teoritis maupun fakta; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu yang menguraikan tentang penelitian yang pernah dilakukan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini; landasan teori yang mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kondisi keuangan terhadap luas pengungkapan sukarela; dan hipotesis yang berisi dugaan sementara mengenai adanya pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan kondisi keuangan terhadap luas pengungkapan sukarela yang akan diuji dalam penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai pendekatan penelitian yang digunakan yaitu, pendekatan kuantitatif; identifikasi variabel independen yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan kondisi keuangan, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah luas pengungkapan sukarela; definisi operasional dari variabel independen dan variabel dependen; jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini; metode pemilihan kriteria sampel penelitian yaitu menggunakan *purposive sampling*.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan kondisi keuangan terhadap luas pengungkapan sukarela yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian; deskripsi hasil penelitian; uji model dan uji hipotesis; pembuktian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan pembahasan sebelumnya yaitu mengenai pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan kondisi keuangan terhadap luas pengungkapan sukarela; keterbatasan dalam penelitian serta saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang sekiranya dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.